

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini berita mengenai kekerasan terhadap anak tidak lagi asing didengar, baik itu berupa tindak kejahatan perdagangan anak maupun kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ialah sebuah bentuk penganiayaan, baik fisik maupun psikis, yang dapat mengakibatkan terancamnya kesejahteraan dan tumbuh kembang anak. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>1</sup>

Sebagai contoh mengenai kekerasan seksual terhadap anak ialah dalam kasus Yuyun (14 tahun), siswi SMP 5 Satu Atap Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT), Kabupaten Rejang, Provinsi Bengkulu yang telah diperkosa oleh 14 pelaku. Dari hasil pemeriksaan aparat Polres Rejang Lebong dan Polsek PUT, Pelaku menodai korban hingga menghabiskan nyawanya dengan begitu sadis dan tidak manusiawi. Dalam kronologisnya, ke-14 pelaku dalam keadaan mabuk keluar dari rumah dan duduk di tepi jalan perkebunan karet di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT). Selanjutnya para pelaku yang sedang berkumpul itu melihat

---

<sup>1</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 8.

Dari kerja keras petugas kepolisian setempat, ke-14 pelaku berhasil ditangkap. Setelah menjalani pemeriksaan dan para pelaku dinyatakan sebagai tersangka, maka persidangan pun segera dilaksanakan. Hasil dari serangkaian proses persidangan menyatakan bahwa penjatuhan putusan terhadap ke-14 pelaku telah dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan Zainal alias Bos terbukti memerkosa dan membunuh Yuyun dan majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Zainal tersebut. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d di UU No. 35 Tahun 2014. Selain Zainal, empat terdakwa lainnya yaitu Suket, Bobi alias Tobi, Faisal dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah). Terhadap seorang terdakwa yang masih di bawah umur, hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sedangkan terhadap 7 pelaku lainnya divonis dengan

[illegible]

Menyinggung mengenai hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorangpun boleh mengingkari hak asasi manusia tanpa keputusan hukum yang adil.<sup>4</sup> Semua hak dan kebebasan manusia yang terlihat secara singkat, diceritakan dalam pernyataan Universal Hak-Hak Asasi (Universal Declaration of Human Rights) yang dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, bisa muncul menjadi hak yang telah dirampas dari tangan penguasa absolut, oleh warga negaranya melalui petisi Hak-Hak Asasi (Petition of Rights). Seluruh Undang-undang Hak Asasi (Bill of Rights), secara sederhana mulai diperkenalkan untuk diketahui oleh raja-raja penguasa waktu itu, sebagai mekanisme pengendali terhadap keinginan lalim

<sup>3</sup><http://jawapos.com>, "diakses pada", 28 Oktober 2016.

<sup>4</sup>Rhoda E. Howard, HAM : Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, (Jakarta : Grafiti, 2000), 1.

Berdasarkan Deklarasi PBB di atas, dijelaskan bahwa didalamnya diatur mengenai hak-hak anak, yang diantara hak dalam deklarasi PBB tersebut ialah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mengemukakan pendapatnya dimuka umum. Dalam Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, kerananya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan maka merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup>

Sama halnya dengan negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, di dalam Islam, perintah untuk menjaga dan melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagai bentuk kewajiban

<sup>6</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰 𐌱

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adlah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"<sup>7</sup>

Dinilai anak sebagai sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus, maka diundangkanlah beberapa undang-undang yang memuat mengenai perlindungan anak sebagai bentuk kepedulian negara ini terhadap anak. Beberapa instrumen perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak diantaranya ialah UUD 1945, UU No. 3 Tahun 1979 tentang Pengaduan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), 448.

Penjatuman pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Padahal di lain pihak pelaku juga melanggar UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni Pasal 81 tentang orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dalam Pasal ini pelaku diancam dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Bentuk sanksi yang terdapat dalam beberapa produk hukum mengenai perlindungan anak terhadap tindak kejahatan Pemerkosaan rupanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dibuktikan dengan

[illegible]

Setelah UU No. 23 Tahun 2002 di revisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, kini diundangkan peraturan baru mengenai sanksi pidana pemerkosaan anak di bawah umur berupa kebiri kimia yang terdapat di dalam Perpu No. 1 Tahun 2016. Kebiri atau pengebirian merupakan tindakan bedah atau kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Kebiri secara fisik adalah memotong

<sup>10</sup> Orientasi pada kebijakan (Police Oriented Approach) memuat mengenai kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. sedangkan orientasi pada nilai (Value Oriented Approach) memuat mengenai nilai sosiopolitik, nilai sosiofilosofis dan nilai sosiostruktural.



Di dalam Islam pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan harus sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam, yaitu yang mengandung sebuah kemaslahatan dengan memperhatikan lima pedoman yakni keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga atau keturunan dan keselamatan harta. Dalam sejarah hukum Islam, kebiri kimia memang belum ada sehingga kebiri kimia merupakan suatu hal baru yang harus dicari letak kemaslahatannya dengan cara menggali manfaat hukum kebiri kimia dari sumber hukum Islam yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menganalisis kebiri kimia dengan salah satu sumber hukum Islam yaitu masalah mursalah. Dari adanya analisis sanksi kebiri kimia terhadap pemerkosa anak di bawah umur ini diharapkan dapat diketahui kemaslahatan hukum kebiri bagi pemerkosa anak di bawah umur dan korban pemerkosaan.

Dari latar belakang di atas, maka pokok yang terkaji dalam pembahasan ini ialah:







membahas tentang kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dan menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia di amsa yang akan datang.<sup>12</sup>

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual", menjelaskan bagaimana perlindungan hukum. dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku di tinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.<sup>13</sup>

Ngabdul Munngim, dalam skripsinya yang berjudul “Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”, dijelaskan dalam penelitian ini bahwa penulis lebih mengutamakan sanksi kebir kimia apabila dijadikan sebagai bentuk pembaharuan hukum dalam sanksi pedofilia.<sup>14</sup>

Sebelum melakukan suatu penelitian lebih dalam, peneliti akan mengungkapkan persamaan dan perbedaan titik acuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya. Persamaan titik acuan peneliti dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai korban pelecehan seksual yaitu anak di bawah umur, bentuk perlindungan anak, dan bentuk ancaman sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan titik

<sup>12</sup>Muhammad Zainudin, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Peofilia", ("Tesis", --, Universitas Diponegoro, Semarang 2007).

<sup>13</sup>Arifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual", ("Skripsi", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

<sup>14</sup>Ngabdul Munngim, "Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia", ("Skripsi", Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

isian ilmiah tentu memiliki  
kelebihan materi tersebut

melitian skripsi sebagai be

sanksi kebiri kimia dalam

- berdasarkan Pasal 81 Perpu M  
analisis masalah mums  
pemeriksaan anak di ba  
un 2016

tian

- Imuwan)

siswa fakultas Syaria

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dengan memperhatikan bentuk kemaslahatan yang mengandung lima unsur jaminan dasar yaitu keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan serta keselamatan harta benda.

1. **Maslahah Mursalah** adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut.<sup>15</sup>

[illegible]



## 1. Jenis Penelitian

## 2. Data yang dikumpulkan

Data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah:

- [illegible]







Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Setelah semua data yang terkait dengan permasalahan tersebut kemudian akan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- [illegible]

## 6. Teknik Analisis Data

## 8. Sistematika Pembahasan

sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:..

BAB pertama merupakan awal yang memaparkan secara global tentang latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi Pendahuluan mengenai pokok penelitian yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua menjelaskan secara detail mengenai masalah-mursalah. Dalam bab ini berisi kerangka teoritis atau kerangka konseptual mengenai masalah-mursalah yang memuat mengenai konsep-mursalah-mursalah yang meliputi definisi, dasar hukum, kehujjahan, objek dan syarat-syarat masalah-mursalah.

BAB ketiga akan menjelaskan secara detail mengenai deskripsi singkat tentang masalah kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mulai dari disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2016 hingga bagaimana tata cara pelaksanaan hukuman pengebirian.

BAB keempat berisi mengenai analisis masalah mursalah terhadap sanksi kebiri kimia dalam pidana pemerkosaan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016.

